

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Efektivitas *Good Governance* Di Pemerintah Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas” Perumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Efektivitas *Good Governance* di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas *good governance* di pemerintah desa pegalongan kecamatan patikraja kabupaten banyumas. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, informan ditetapkan antara lain: Perangkat Desa 2 orang, BPD 2 orang dan Masyarakat Desa Pegalongan 7 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Transparansi : Pada aspek ini akses informasi mengenai alokasi dana desa mudah didapatkan oleh masyarakat melalui rapat desa dan baliho-baliho yang terpampang di jalan. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah terbuka dengan melibatkan masyarakat didalam pembuatannya.
2. Aspek Akuntabilitas : Dalam hal pengawasan terhadap program yang dilaksanakan masyarakat belum ikut terlibat hanya lembaga pemerintah desa yang melakukan pengawasan, dan dalam hal pembangunan belum semua sesuai target dikarenakan anggaran sementara dialihkan ke blt dana desa
3. Aspek Efektif dan Efisien : Dalam pelaksanaan program kerja sudah tepat sasaran namun untuk hasilnya belum maksimal, khususnya di rw 3 pembangunan belum terlaksana dengan baik masih ada jalan-jalan yang rusak dan penerangan yang kurang.
4. Aspek Supremasi Hukum : Dalam menentukan arah kebijakannya, pemerintah desa melihat situasi dan kondisi yang ada di desa. Dan dalam pelaksanaannya Program pemerintah desa selalu taat terhadap UU dan aturan yang berlaku. Namun Perangkat Desa masih kurang disiplin dalam bekerja.
5. Aspek Partisipan : Masyarakat selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, dan masyarakat selalu mendukung setiap kebijakan pembangunan desa
6. Aspek Konsensus : semua kegiatan yang dilakukan oleh desa selalu dimusyawarahkan dengan melibatkan semua tokoh masyarakat

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Dalam hal pengawasan, sebaiknya masyarakat dilibatkan untuk mengontrol pembangunan. Jika masyarakat ikut serta dalam hal pengawasan, maka tujuan dari pembangunan tersebut akan tercapai.
2. Untuk Pemerintah Desa Pegalongan sebaiknya lebih memerhatikan pembangunan di dusun 3, karena letaknya yang berada di pegunungan sehingga harus lebih mengutamakan kualitas pembangunan tersebut.

Masih banyak jalan-jalan yang rusak, penerangan jalan yang kurang serta belum adanya drainase di dusun tersebut.

3. Kepada Perangkat Desa Pegalongan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Karena dengan menerapkan sikap kedisiplinan akan menentukan kualitas dan hasil kerja yang bermutu.

SUMMARY

This research is entitled "The Effectiveness of Good Governance in Pegalongan Village Government, Patikraja District, Banyumas Regency". The formulation of the problem proposed is How Effectiveness of Good Governance in Pegalongan Village, Patikraja District, Banyumas Regency?. The purpose of this study was to describe and analyze the effectiveness of good governance in the Pegalongan village government, Patikraja district, Banyumas district. This research method uses qualitative, the informants are determined, among others: Village Apparatus 2 people, BPD 2 people and Pegalongan Village Community 7 people. The research method used is a qualitative descriptive method. Based on data analysis and discussion of research results, it can be concluded as follows:

- 1. Transparency Aspect: In this aspect, acces to information regarding the allocation of village fund is easily obtained by the community throught village meetings and billboardpoted on the road. In making open government policy by involving the community in its making.*
- 2. Accountablillity Aspect: In tern of supervision of program implemented by the community, only village government institutions are carrying out supervision, and in terms of development, not all of them are on target because the temporary budget has been transferred to BLT village funds.*
- 3. Effective and Efficient Aspects: The implementation of the work program has been right on target but the resukts have not been maximized, especially in Rw 3 the development has not been carried out properly, there are still damaged roads and poor lighthing.*
- 4. Aspect of the rule of law: In determining the direction of its policy, the village governmentlooks at the situation and conditions in the village. And in its implementation the village government always obeys the applicable laws and regulations.*
- 5. Participant Aspect: The community is always involved in policy making, and the community always supports every village development policy.*
- 6. Consensus Aspect: all activities carried out by the village are always discussed with theinvolvement of all community leaders.*

Based on the conclusions above, the authors propose the following implication:

- 1. In terms of supervision, the community should be invoved to control development. If the community participates in supervising, then the objective of the development will be achived.*
- 2. The Pegalongan Village Government should pay more attention to development in Hamlet 3, because it is located in the mountain, so it must prioritize the quality of the development. There are still many damaged roads, lack of street lighthing and the absenceof drainage in the hamlet.*

3. *To the Pegalongan Village Apparatus to further improve discipline at work. Because by applying a disciplined attitude will determine the quality and quality of work.*